

ANALISIS JURNAL
“DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA”

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Jumlah SKS : 2
Semester/Kelas : 2/F
Pengampu Mata Kuliah : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.
2. Drs. Rapani, M.Pd.



Disusun Oleh :

Desmita Maharani (2413053185)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

ANALISIS JURNAL

“DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA”

Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tercermin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam penjelasannya, penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi, praktiknya di lapangan masih banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman, seperti musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Salah satu persoalan utama yang diangkat adalah masih lemahnya kualitas demokrasi dalam pemilihan umum, terutama di daerah. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses pemilu sering kali diwarnai dengan konflik, politik uang, dan praktik curang lainnya. Calon kepala daerah yang maju lewat jalur independen juga dihadapkan dengan syarat-syarat yang memberatkan, sehingga ruang demokrasi terasa sempit dan tidak merata untuk semua pihak.

Penulis juga menyoroti peran partai politik yang seharusnya menjadi sarana aspirasi rakyat, namun dalam kenyataannya sering kali justru tidak mencerminkan semangat demokrasi. Calon kepala daerah sering ditunjuk oleh elit partai tanpa melalui mekanisme yang transparan dan demokratis. Ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan keterwakilan rakyat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Demokrasi bukan sekadar prosedur memilih pemimpin, tapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam berpolitik. Untuk itu, perlu adanya pembenahan dalam sistem pemilu, peran partai politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, bisa benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.